

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROSES
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Tesis



Diajukan Oleh
NIZA WIBYANA TITO
15.230.3119

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROSES
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh
NIZA WIBYANA TITO
15.230.3119

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROSES
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Nama : NIZA WIBYANA TITO
NIM : 15.230.3119
Kebidangan : Manajemen keuangan

Yogyakarta, Oktober 2017
Telah Disetujui dan Disahkan Oleh
Dosen Pembimbing II

Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak., CA., CPA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

Niza Wibyana Tito

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah...
Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu...
Shalawat dan salamku kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW...
Ku harap syafa'atmu di penghujung hari nanti...
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan
karya ilmiah ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang
senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan kedunia ini.

Untuk Para Orang tuaku,
Ibu Yusna Siti Hardjanti dan Bapak UUD Riyanto
Ibu Zaharawati dan Ayah Dahari
Bapak Goenadi Wibisono
Yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan restunya.

Untuk para Guruku dan Dosenku
Khususnya Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak., CA., CPA, Para Dosen di STIE
Widya Wiwaha dan Lainnya
Terima kasih sudah memberikan ilmu, pencerahan dan inspirasi kepada saya.

Para Staff STIE Widya Wiwaha
Terima kasih sudah membantu dan memberikan layanan excellent kepada saya,

Untuk Pak Rudy dan Superteam Syncore
Terimakasih banyak atas dukungannya.

Spesial Untuk Istriku - Sahabatku
Noveza Darhayati
Yang telah sabar menemani dikala susah dan senang, dikala sedih dan gembira.
I Love You

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Analisis Implementasi Proses Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali” ini dapat diselesaikan.

Tesis berjudul “Analisis Implementasi Proses Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali” diangkat penulis karena keterlibatan penulis didalam implementasi dan pendampingan di badan layanan umum daerah khususnya di bidang kesehatan yaitu Puskesmas BLUD di Indonesia. Sehingga tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi implementasi pola pengelolaan Keuangan di Puskesmas BLUD.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) dalam bidang keahlian manajemen Keuangan pada program studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Drs Muhammad Subhan, MM selaku Ketua STIE Widya Wiwaha.
2. Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak., CA., CPA dan bapak Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA, Akt selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran dan bimbingannya yang begitu besar selama penyusunan tesis ini. Atas dorongan Beliau sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak I wayan Nuka Lantara, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dosen Penguji tesis, terima kasih banyak atas saran perbaikan yang diberikan.
4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen
5. Seluruh Staff Program Pascasarjana Magister Manajemen
6. Staff Magister Manajemen yang selalu membantu dalam segala hal.
7. Kepada kedua orangtua ku atas segala motivasi, perhatian dan doanya.

8. Istri saya Noveza Darhayati, S.T., atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu.
9. Bapak Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.,CA dan rekan-rekan di PT. Syncore Indonesia yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
10. Rekan rekan S2 di Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Yogyakarta, Oktober 2017

Penulis,

Niza Wibyana Tito

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ARTI SIMBOL DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1. Pengertian BLUD.....	12
2.1.2. Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	16
2.1.3. Triangulasi	17

2.2. Penelitian terdahulu	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Rancangan/Desain Penelitian	27
3.2. Definisi Operasional Variabel	27
3.3. Subjek dan Obyek Penelitian.....	28
3.3.1 Subjek	28
3.3.2 Obyek.....	28
3.4. Instrument Penelitian.....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6. Metode Analisis Data	30
3.7. Keabsahan Data	34
BAB IV.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Karakteristik Subjek Penelitian	38
4.2.1. Karakteristik berdasarkan pendidikan	38
4.2.2. Karakteristik berdasarkan umur	39
4.2.3. Karakteristik berdasarkan jabatan	39
4.3. Hasil Wawancara	40
4.3.1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD	40
4.3.2. Rencana bisnis dan anggaran (RBA) disusun	43
4.3.3. Pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan	45
4.3.4. Pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi Keuangan (SAK) 48	

4.3.5.	Laporan keuangan SAK telah diaudit oleh auditor eksternal.....	50
4.3.6.	Kabupaten Boyolali telah memiliki / menyelenggarakan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK	52
4.3.7.	Puskesmas memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD.....	54
4.3.8.	Puskesmas BLUD telah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada standar akuntansi Keuangan (SAK).....	56
4.4.	Pembahasan	59
BAB V	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1.	Kesimpulan.....	65
5.2.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data temuan awal di Puskesmas Boyolali
2. Tabel 4.1 Karakteristik pendidikan Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali
3. Tabel 4.2 Karakteristik usia Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali
4. Tabel 4.3 Karakteristik Jabatan Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali
5. Tabel 4.4 Uji kredibilitas sumber Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Puskesmas Untuk Dapat Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
6. Tabel 4.5 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Puskesmas Untuk Dapat Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
7. Tabel 4.6 Uji kredibilitas sumber Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)
8. Tabel 4.7 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)
9. Tabel 4.8 Uji kredibilitas sumber Pelaporan Pengesahan Penggunaan Anggaran Triwulanan
10. Tabel 4.9 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Kemampuan Setiap AR Dalam Berkomunikasi Dengan Wajib Pajak Sudah Baik
11. Tabel 4.10 Uji kredibilitas sumber Pelaporan Keuangan Berbasis (Standar Akuntansi Keuangan) SAK
12. Tabel 4.11 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Pelaporan Keuangan Berbasis (Standar Akuntansi Keuangan) SAK
13. Tabel 4.12 Uji kredibilitas sumber Laporan Keuangan (Standar Akuntansi Keuangan) SAK Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal
14. Tabel 4.13 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Laporan Keuangan (Standar Akuntansi Keuangan) SAK Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal

15. Tabel 4.14 Uji kredibilitas sumber Kabupaten Boyolali Telah Memiliki / Menyelenggarakan Sistem Akuntansi Yang Sesuai Dengan SAK
16. Tabel 4.15 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Penguasaan Dan Implementasi Atas Peraturan- Peraturan Perpajakan
17. Tabel 4.16 Uji kredibilitas sumber Puskesmas Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD
18. Tabel 4.17 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Puskesmas Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan BLUD
19. Tabel 4.18 Uji kredibilitas sumber Puskesmas BLUD Telah Menyusun /Memiliki Kebijakan Akuntansi Yang Berpedoman Kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
20. Tabel 4.19 Uji kredibilitas triangulasi Teknik Puskesmas BLUD Telah Menyusun/Memiliki Kebijakan Akuntansi Yang Berpedoman Kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

STIE Widya Widwara
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disidasi oleh Sugiyono (2015:247)
2. Gambar 3.2 Triangulasi sumber
3. Gambar 3.3 Triangulasi teknik

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ARTI SIMBOL DAN SINGKATAN

1. BLU : Badan Layanan Umum
2. BLUD : Badan Layanan Umum Daerah
3. SIPPK : Sistem Informasi Pola Pengelolaan Keuangan
4. K/L : Kementerian / Lembaga
5. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. PNBK : Pendapatan Negara Bukan Pajak
8. RBA : Rencana Bisnis dan Anggaran
9. SAK : Standar Akuntansi Keuangan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

INTISARI

ANALISIS IMPLEMENTASI PROSES POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh :
NIZA WIBYANA TITO

Latar belakang : Permasalahan yang umum dalam penyusunan RBA adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip accrual dan kurangnya wawasan bisnis dalam menyusun rencana produk jasa, perkiraan pasar, biaya satuan, rencana keuangan dan lain-lain. Selain itu masih banyak dijumpai proses penyusunan RBA yang terbalik, dimana RBA disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis dan mengetahui masalah yang muncul pada implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Boyolali.

Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *descriptive analysis*, Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala bagian pengelolaan BLUD, Bagian pengelola teknis, Bagian keuangan dan akuntansi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pegawai tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD, penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) dimulai dari pembuatan RKA, pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar, pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan (SAK) masih belum berjalan, belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK. Kabupaten Boyolali telah memiliki/ menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK, Puskesmas belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD, Puskesmas BLUD belum pernah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK.

Kesimpulan : Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005.

Kata Kunci : implementasi, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRACT

PROCESS ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT PATTERN GENERAL SERVICES AGENCY OF PUSKESMAS REGIONIN REGENCY OF BOYOLALI

By:

NIZA WIBYANA TITO

Background: The most common problems in RBA development are the lack of understanding of the accrual principle and the lack of business insight into product service plans, market forecasts, unit costs, financial plans and more. Besides that there are still many RBA inverted drafting process, where RBA is compiled based on Work Plan Budget (RKA) SKPD.

Research Objectives: To analyze and identify problems that arise in the implementation of financial management pattern BLUD Puskesmas in Boyolali District.

Research Method: This research type is qualitative with descriptive analysis method, subjects in this research are Head of BLUD management section, technical manager part, finance and accounting department. The validity of data in this study using triangulation of sources and techniques.

Research Result: From the result of the research, it is found that employees do not know the requirements that must be fulfilled by the Puskesmas to apply the BLUD Financial management pattern, the preparation of business plan and budget (RBA) starting from RKA making, reporting of the quarterly budget utilization that is reporting the money in and out, financial reporting based on Financial Accounting Standard (SAK) has not been running yet. There has never been an audit on financial statements Financial Accounting Standards (SAK). Boyolali District has owned/conducted accounting system that has not complied with SAK, Puskesmas do not have standard operating procedure (SOP) the implementation of BLUD Finance Administration, Puskesmas BLUD has never compiled/has accounting policies that are guided by SAK.

Conclusion: Implementation of Financial Management Pattern Public Service Area of Puskesmas In Boyolali District still not in accordance with Government Regulation of Republic of Indonesia Number 23 Year 2005.

Keywords: implementation, Financial Management of Regional Public Service Board

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang tertera pada pasal 68 dan 69 telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (satker BLU).

Peluang Satker BLU terbuka bagi satker pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, Pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi umum, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, satker BLU dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan (*Manual pengelolaan satker BLU bidang kesehatan, Direktorat jendral perbendaharaan kementerian keuangan RI, Jakarta 2013*):

1. Penyedia layanan barang dan/atau jasa, misalnya: pendidikan dan pelatihan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta bidang penyiaran public.
2. Pengelola wilayah/kawasan tertentu, misalnya: otorita, kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
3. Pengelola dana khusus, misalnya: pengelola dana bergulir, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (*Permendagri 61/2007 ps 1(1)*).

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. (*Permendagri 61/2007 ps 1 (2)*).

Badan layanan umum daerah bidang kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, saat ini terdapat tiga kategori utama BLUD bidang layanan kesehatan, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawah pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
2. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Kesehatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Rumah sakit pemerintah merupakan institusi pelayanan publik yang memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, alur birokrasi yang panjang, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya mengukur kinerja. Melalui PPK-BLUD rumah sakit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, entrepreneurship, transparansi dan akuntabilitas.

Begitu pula pada Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana SKPD Dinas Kesehatan bukan merupakan BLUD, sedangkan paska jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga perlu perubahan paradigma pada setiap orang di Puskesmas.

Penelitian yang banyak dilakukan di bidang kesehatan adalah di RSUD sebagai SKPD Pemerintah daerah kabupaten/Kota, tema yang banyak diangkat oleh Peneliti terdahulu mengenai RSUD adalah membahas bagaimana Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mulai dari Perencanaan, penatausahaan keuangan dan Pelaporan.

Permasalahan yang umum dalam penyusunan RBA adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip accrual dan kurangnya wawasan bisnis dalam menyusun rencana produk jasa, perkiraan pasar, biaya satuan, rencana keuangan dan lain-lain. selain itu masih banyak dijumpai proses penyusunan RBA yang terbalik, dimana RBA disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Proses penyusunan RBA pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pendekatan rencana bisnis dari sekedar rencana kegiatan, karena RBA yang berisi program, rencana operasional dan rencana pembiayaan tahunan, merupakan implementasi dari Rencana Strategis Bisnis yang telah disusun untuk rencana lima tahunan. Secara teknis, penyusunan RBA juga memerlukan penguasaan kebijakan dan metode akuntansi, terutama dalam penyajian prognosa dan proyeksi laporan keuangan. Dalam rangka membantu Manajemen RS Daerah atau SKPD-BLUD menyusun laporan kinerja BLUD, dan agar Dewan Pengawas BLUD dapat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.

Dalam pasal 114 disebutkan bahwa kebijakan penatausahaan BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan penetapan kebijakan tersebut disampaikan kepada PPKD, akan tetapi Peraturan Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tidak memberikan detail tentang mekanisme, tata acara, format serta bentuk bentuk dalam laporan.

Instansi pemerintah yang menerapkan BLUD dalam implementasi penatausahaan Keuangan BLUD mengalami banyak kendala, oleh Karena itu sebagian besar dari mereka mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa dari mereka

membuat aturan tersendiri yang rentan akan pengendalian Internal sehingga menjadi temuan dalam Audit. Hampir kebanyakan BLUD mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena belum adanya kejelasan tentang format dan alur data transaksi. Berbagai permasalahan pun sering timbul disebabkan adanya simpang siur terkait implementasi penatausahaan keuangan BLUD.

Evaluasi akan dilakukan di 29 Puskesmas yang berada di Kabupaten Boyolali, berikut adalah daftar nama nama Puskesmas tersebut:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 1.1 Data temuan awal di Puskesmas Boyolali

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Dokumen Syarat BLUD	RBA	Laporan Pengesahan Anggaran	Laporan keuangan	Audit eksternal	Sistem akuntansi	SOP Keuangan	Kebijakan Akuntansi
1	Selo	Puskesmas Selo	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
2	Ampel	Puskesmas Ampel I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
3	Ampel	Puskesmas Ampel II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
4	Cepogo	Puskesmas Cepogo	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
5	Musuk	Puskesmas Musuk II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
6	Musuk	Puskesmas Musuk I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
7	Boyolali	Puskesmas Boyolali I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
8	Boyolali	Puskesmas Boyolali II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
9	Boyolali	Puskesmas Boyolali III	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
10	Mojosongo	Puskesmas Mojosongo	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
11	Teras	Puskesmas Teras	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
12	Sawit	Puskesmas Sawit II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
13	Sawit	Puskesmas Sawit I	ada	x	ada	x	x	ada	x	X

14	Banyudono	Puskesmas Banyudono I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
15	Banyudono	Puskesmas Banyudono II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
16	Sambi	Puskesmas Sambi I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
17	Sambi	Puskesmas Sambi II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
18	Ngemplak	Puskesmas Ngemplak	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
19	Nogosari	Puskesmas Nogosari	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
20	Simo	Puskesmas Simo	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
21	Karanggede	Puskesmas Karanggede	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
22	Klego	Puskesmas Klego I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
23	Klego	Puskesmas Klego II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
24	Andong	Puskesmas Andong	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
25	Kemusu	Puskesmas Kemusu I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
26	Kemusu	Puskesmas Kemusu II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
27	Wonosegoro	Puskesmas WonoSegoro I	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
28	Wonosegoro	Puskesmas Wonosegoro II	ada	x	ada	x	x	ada	x	x
29	Juwangi	Puskesmas Juwangi	ada	x	ada	x	x	ada	x	x

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 29 Puskesmas di Boyolali tidak memiliki SOP, tidak membuat RBA, laporan keuangan, audit eksternal dan kebijakan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan di Puskesmas Boyolali mempunyai peluang besar tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Dimana seluruh Puskesmas tersebut mempunyai kewajiban yang sama dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yaitu:

1. Membuat rencana bisnis dan Anggaran setiap tahunnya.
2. Membuat laporan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja setiap tiga bulan kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Membuat laporan keuangan setiap 6 bulan atau semesteran yang berbasis standar akuntansi keuangan (SAK) yaitu; neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Maka dari itu Peneliti mengangkat tema mengenai “Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas” yang lokasi penelitian berada didaerah Kabupaten Boyolali, dengan pembahasan yang sama dengan Peneliti sebelumnya dengan konteks yang sangat berbeda yaitu UPTD Puskesmas.

Karena itu, tulisan ini mempresentasikan pelajaran yang didapatkan dari implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD di beberapa konteks yang berbeda. Pelajaran difokuskan pada identifikasi masalah dan faktor penyebab (sampai

tingkat tertentu). Penelitian seperti penting karena selama ini di literatur sudah sangat banyak pelajaran yang didapatkan dari implementasi yang sukses, tetapi masih sangat jarang yang memberikan perhatian yang memadai untuk implementasi yang bermasalah.

1.2. Perumusan Masalah

Seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali telah menerapkan BLUD sejak tahun 2015, sehingga dana pendapatan puskesmas bisa digunakan langsung untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa disetor ke Pemerintah Daerah (PEMDA), sehingga memotong rantai birokrasi PEMDA dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif, dan efisien.

Puskesmas di kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan proses pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) disinyalir belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya kewajiban kewajiban Puskesmas BLUD.

Puskesmas yang telah menerapkan BLUD memiliki kewajiban yang harus dilakukan dapat digambarkan dalam siklus pengelolaan keuangan BLUD yaitu: Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan, maka analisis implementasi PPK-BLUD dititikberatkan kepada alur proses tersebut.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan yang terjadi pada saat Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD, Sehingga dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi pelaksanaan proses pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di kabupaten Boyolali?

Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk membuktikan keabsahan data yang didasarkan pada data wawancara dari ketiga informan yang terlibat langsung di BLUD. Keragaman konteks ini membantu dalam menganalisis pengaruh karakteristik terhadap masalah yang muncul.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui masalah yang muncul pada implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Boyolali, serta solusi yang dapat diupayakan untuk masalah tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan/pedoman dalam penerapan pola pengelolaan keuangan Puskesmas BLUD di Kabupaten Boyolali.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan puskesmas daerah lain
3. Hasil penelitian ini bagi Peneliti dapat digunakan untuk menerapkan teori didapat ke dalam situasi sesungguhnya yang terdapat di lapangan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian BLUD

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012), BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Suatu satuan kerja

instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:

- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis
- d. Laporan keuangan pokok
- e. Standar pelayanan minimum; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Menteri/pimpinan lembaga mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PK-BLU kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan tersebut dan apabila telah memenuhi semua persyaratan di atas, maka Menteri Keuangan menetapkan instansi pemerintah bersangkutan untuk menerapkan PK-BLU berupa pemberian status BLU secara penuh atau bertahap. Dalam rangka penilaian usulan PK-BLU, Menteri Keuangan dapat membentuk Tim Penilai yang terdiri dari unsur di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan kegiatan satker BLU yang diusulkan, antara lain Ditjen Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Ditjen Anggaran. Tim Penilai tersebut dapat menggunakan narasumber yang berasal dari lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, usulan penetapan BLU dapat ditolak atau ditetapkan dengan status BLU penuh maupun BLU bertahap. Status BLU penuh diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah dipenuhi dengan memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian. Satker yang berstatus

BLU Penuh diberikan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, yaitu:

- a. Pengelolaan Pendapatan
- b. Pengelolaan Belanja
- c. Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pengelolaan Barang
- e. Pengelolaan Kas
- f. Pengelolaan Utang dan Piutang
- g. Pengelolaan Investasi
- h. Perumusan Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

Status BLU Bertahap

Status BLU Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi, namun persyaratan administratif kurang memuaskan sesuai dengan kriteria SOP penilaian. Status BLU Bertahap berlaku paling lama tiga tahun dan apabila persyaratan terpenuhi secara memuaskan dapat diusulkan untuk menjadi BLU penuh. Fleksibilitas yang diberikan kepada satker berstatus BLU bertahap dibatasi:

- a. Penggunaan langsung pendapatan dibatasi jumlahnya, sisanya harus disetorkan ke kas negara sesuai prosedur PNBK.
- b. Tidak diperbolehkan mengelola investasi.
- c. Tidak diperbolehkan mengelola utang.
- d. Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

- e. Tidak diterapkan *flexible budget*.

2.1.2. Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- a. Standar pelayanan dan tarif layanan

Puskesmas yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan. Dalam hal puskesmas maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/BLUD.
- 2) Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya
- 4) Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/BLUD.

- 5) Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Puskesmas yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh puskesmas kepada Menteri Keuangan/Menteri Kesehatan/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kontinuitas dan pengembangan layanan.
- 2) daya beli masyarakat.
- 3) asas keadilan dan kepatuhan.
- 4) kompetisi yang sehat.

2.1.3. Triangulasi

Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh N. K. Denzin (1978) dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi dan militer, yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi asumsi bahwa

setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau metode lainnya. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian (Sugiono, 2012).

Metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi yaitu yang pertama, pada level pendekatan, teknik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode sekaligus yakni, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Hal ini didasarkan karena, masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan berbeda jika dilihat dengan menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu akan sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang yang berbeda tersebut digunakan secara bersama-sama dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih lengkap dan sempurna. Pada level pendekatan penelitian, penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah kegiatan penelitian ditujukan untuk menemukan sesuatu yang lebih utuh dari objek penelitian. Asumsi kedua yang mendasari penggunaan teknik triangulasi yakni, pada level pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisis data

membutuhkan sebuah prosedur untuk menguji hasil analisis data (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif atau dapat juga dengan menekankan pada kedua metode. Apabila peneliti menekankan pada metode kualitatif, maka metode kuantitatif dapat digunakan sebagai fasilitator dalam membantu melancarkan kegiatan penelitian, dan sebaliknya jika menekankan metode kuantitatif. Namun apabila peneliti memberi tekanan yang sama terhadap kedua metode penelitian (kuantitatif-kualitatif) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan yakni: yang pertama memahami masing-masing metode dan pentingnya metode tersebut dalam suatu penelitian yang akan dilakukan; kedua, memahami permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan sehingga penggunaan metode kualitatif dan metode kuantitatif ini disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai; ketiga, kedua metode yang digunakan juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kepentingan, dimana kedua metode dapat digunakan dalam desain secara bersama-sama namun pada laporan penelitian hanya diperhitungkan salah satunya saja; dan yang ketiga, kedua metode juga digunakan berdasarkan pertimbangan keterampilan peneliti, yang terlibat dalam satu kegiatan penelitian secara simultan apabila ada hubungan dengan masalah dan tujuan penelitian (Nursalam, 2013).

Menggunakan metode triangulasi yakni penggabungan dua metode dalam satu penelitian diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, peneliti harus terlebih dahulu menghitung dan memperkirakan apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dalam penelitian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja. Selain itu juga diperhitungkan waktu, tenaga dan dana yang dihabiskan dalam penelitian, apakah akan menghasilkan atau memperoleh hasil yang memuaskan (Nursalam, 2013)

Metode triangulasi banyak menggunakan metode dalam level mikro, yakni bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam suatu penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Hal ini didasarkan karena informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk memeriksa keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan menggunakan kedua metode tersebut. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.

Sebagai contoh proses kerja triangulasi yakni, dalam suatu penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk

pengumpulan data, perlu dipastikan terhimpunnya catatan harian setiap harinya dari wawancara dan observasi tersebut. Kemudian dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian tersebut untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan observasi. Setelah itu, hasil yang telah diperoleh perlu diuji lagi dengan informan-informan sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan, peneliti harus menelusuri perbedaan tersebut sampai peneliti memperoleh sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain. Proses ini dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai peneliti yakin bahwa tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan (Gozali, 2011).

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti. Hal ini dilakukan karena, dalam suatu penelitian dapat terjadi pemahaman yang berbeda antara peneliti dengan informan mengenai suatu objek yang diteliti. Oleh karena itu, untuk menghindarkan adanya pemahaman yang berbeda tersebut, digunakan triangulasi yakni dengan cara peneliti langsung melakukan uji pemahaman kepada informan. Cara ini dapat dilakukan setelah wawancara atau observasi. Uji pemahaman dapat dilakukan diakhir penelitian ketika semua informasi telah dipresentasikan dalam draft laporan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena

dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistic (Sugiyono, 2012).

Triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang banyak digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam buku Lexy.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yakni, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan penyidik atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data. Sedangkan triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam buku Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif adalah berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dalam

mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subjektif.

Penelitian dengan menggunakan metode triangulasi dilakukan dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif dalam suatu penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar lengkap dan komprehensif, walaupun dengan metode ini akan lebih banyak menghabiskan waktu, tenaga dan dana dalam penelitian. Triangulasi sebagai salah satu tehnik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya. Hasil pengumpulan data yang diperoleh

seorang peneliti juga diperiksa oleh kelompok peneliti lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat atau menemukan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada untuk diperbaiki. Cara ini disebut dengan member check (Nursalam, 2013).

2.2. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas masalah kesiapan, pelaksanaan maupun evaluasi dari pengelolaan BLUD baik pukesmas maupun rumah sakit telah banyak diteliti. Namun penelitian yang mengambil sebagian Subjek maupun objek judul diatas pernah dilakukan oleh beberpa peneliti, antara lain:

1. Surianto (2011) yang meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, jenis penelitian yaitu kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Kinerja RSUD Undata dinilai sudah baik. Persamaan pada jenis penelitian dan analisis data sedangkan perbedaan pada dependen (Pelaksanaan BLUD) dan variabel independen (Evaluasi BLUD), tempat dan waktu penelitian
2. Meidyawati (2010) yang meneliti tentang Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi Tujuan Mengetahui implementasi semua persyaratan administrative PPK-BLUD di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data triangulasi. Hasil penelitian ini didapatkan

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi telah menyusun dan mengimplementasikan semua persyaratan administratif PPK-BLUD yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal, dan Laporan Keuangan. Implementasi pola tata kelola diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta transparansi. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada jenis penelitian, analisis data dan Subjek penelitian, perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel dependent (Implementasi) dan variable independent (persyaratan administratif BLUD), tempat dan waktu penelitian.

3. Ely Trianasari dan Muhammad Syafiie Idrus (2008) yang meneliti tentang Evaluasi Strategi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jenis penelitian ini kualitatif, dengan analisis data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa perubahan status menjadi BLUD telah mempengaruhi kondisi dan kinerja RSSA, pengaruh baik maupun kurang baik. Sebagai BLUD masalah yang dihadapi RSSA antara lain keefektifan, keefisienan dan fleksibilitas masih terkendala, alur birokrasi/administrasi yang lama belum tuntas teratasi; pelanggan mayoritas berasal dari golongan menengah ke bawah; keramahan belum diterapkan secara menyeluruh; evaluasi strategi dilakukan oleh bagian lain, bukan oleh bagian yang sama dengan yang melakukan perencanaan strategi; sarana dan prasarana serta kuantitas tenaga masih kurang memadai. Namun dengan segala keterbatasan dan tantangan yang harus dihadapi secara garis besar RSSA

cukup siap dan dapat melaksanakan BLUD. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada jenis penelitian dan analisis data. Perbedaan pada Variabel dependent (Evaluasi) dan variable independent (Strategi BLUD), tempat dan waktu penelitian.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan/Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *descriptive analysis* yaitu upaya untuk memaparkan, menelaah dan memberikan gambaran serta penjelasan yang komprehensif tentang kondisi yang sebenarnya dari objek yang diteliti serta ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena sosial dari sudut perspektif responden

Penelitian *deskriptifkualitatif* yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut (Notoatmodjo, 2010)

3.2. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu strategi pengembangan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola Pengelolaan keuangan BLUD yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Badan layanan umum daerah (BLUD) yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Subjek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subjek

Subjek penelitian adalah informasi yang dapat dijadikan sumber informasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2012). Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala bagian pengelolaan BLUD, Bagian pengelola teknis, Bagian keuangan dan akuntansi

3.3.2 Obyek

Objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati lainnya, serta peristiwa dan gejala yang terjadi dalam masyarakat atau di dalam alam (Notoatmodjo, 2012). Adapun objek penelitian ini adalah implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas di Kabupaten Boyolali.

3.4. Instrument Penelitian

Instrument atau alat dalam penelitian, instrument penelitian ini yaitu:

1. *Check list*

Notoatmodjo (2012:137), mendefinisikan *check list* sebagai suatu daftar pengecekan berisi nama subjek dan beberapa gejala atau identitas lainnya dari sasaran pengamatan. Pengamatan hanya memberikan tanda *check list* (√) pada daftar tersebut yang menunjukkan adanya gejala atau ciri dari sasaran pengamatan.

2. Panduan wawancara

Panduan wawancara ini dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan.

3. Alat tulis pensil, bolpoint, penggaris dan penghapus.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada tiga informan yang mewakili dari 29 (dua puluh sembilan) puskesmas yang ada di Kabupaten Boyolali tentang implementasi pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas Boyolali, wawancara dilakukan secara langsung ketika diadakan pelatihan BLUD dengan tema pemaparan tentang PPPK-BLUD, penyusunan rencana bisnis dan anggaran BLUD, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan berbasis SAK, wawancara dilakukan dengan delapan item pertanyaan sebelum

pelatihan hari pertama dengan jawaban dapat dilihat pada hasil penelitian di BAB IV.

2. Observasi

Observasi dilakukan peneliti dengan membentuk kelompok pelatihan BLUD di sosial media dengan tujuan mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan BLUD yang dilakukan oleh 29 (dua puluh sembilan) Puskesmas, perkembangan kemampuan pengelolaan keuangan dipantau dari jarak jauh dengan sistem online dengan cara peserta melaporkan hasil pengelolaan keuangan pada masing-masing Puskesmas.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa gambar pemantuan atau perkumpulan 29 puskesmas ketika pengadaan pelatihan BLUD.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2015:244).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun

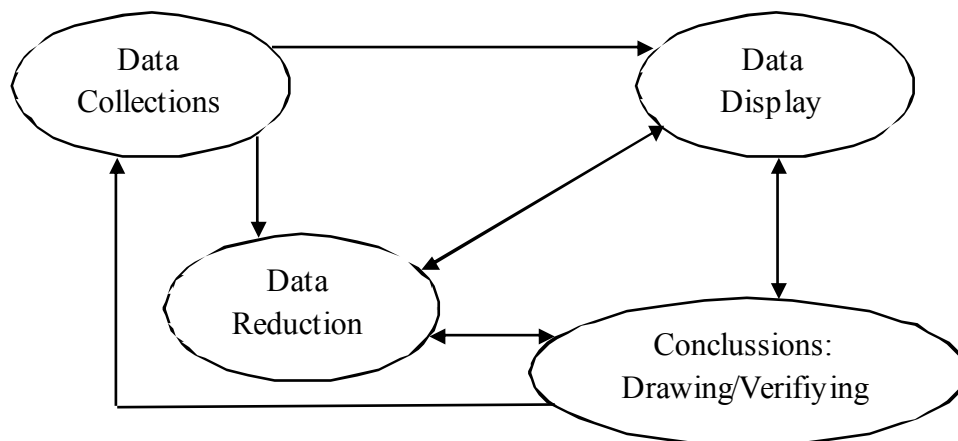
dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan (Sugiyono, 2015:245).

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila setelah dilakukan analisis jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data display, dan *conclusion drawing/ verification*.



Gambar 3.1

Langkah-langkah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disidasi oleh Sugiyono (2015:247)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2015:247).

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2015:249).

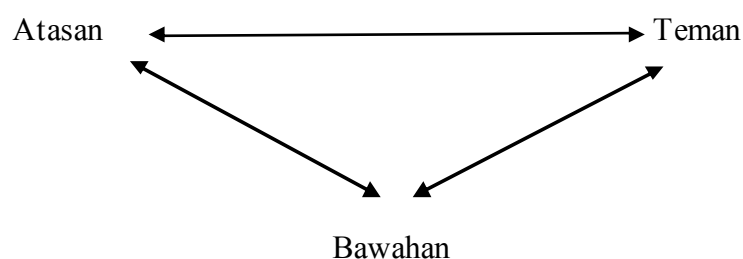
c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2015:252)

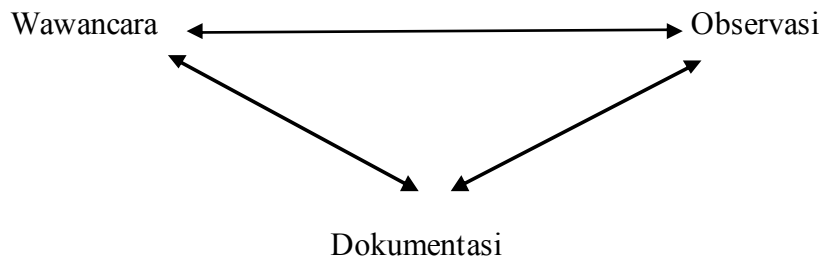
3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Menurut Moleong (2005), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Teknik triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2

“Triangulasi sumber”



Gambar 3.3

“Triangulasi teknik”

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sumber informasi dari informan yaitu Kepala bagian pengelolaan BLUD, bagian pengelola teknis, bagian keuangan dan akuntansi dengan menggunakan lembar wawancara.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun oleh penelitian dengan delapan pertanyaan, kemudian observasi yang dilakukan peneliti dengan memantau dari jarak jauh akan pengelolaan keuangan serta penggunaan dokumentasi berupa bukti laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 29 (dua puluh sembilan) Puskesmas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Profil Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Boyolali adalah gambaran situasi kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Puskesmas di Kabupaten Boyolali yang diterbitkan setiap tahunnya. Dalam setiap edisinya memuat berbagai data dan informasi tentang kesehatan dan data pendukung lain yang berhubungan dengan kesehatan, yang di analisis secara sederhana dan ditampilkan dalam bentuk tabel, peta dan grafik.

2. Visi dan misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu menuju masyarakat Sleman sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan.
- 2) Memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam upaya kesehatan.
- 3) Mengembangkan sumberdaya layanan yang memadai.
- 4) Membangun kerja sama lintas program dan sektor yang harmonis.

3. Moto

Melayani dengan tulus

4. Maklumat standar pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji layanan (memberikan pelayanan secara profesional dan sepenuh hati) tegurlah dan laporkan ke unit pengaduan.

5. Jenis Pelayanan Puskesmas

Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) terdiri dari:

a. Rawat Jalan

- 1) Pelayanan Kesehatan Umum.
- 2) Pelayanan Keperawatan
- 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 5) Pelayanan Konsultasi Gizi.
- 6) Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan.
- 7) Pelayanan Konsultasi Psikologi.
- 8) Pelayanan Laboratorium
- 9) Pelayanan Fisioterapi
- 10) Pelayanan Radiologi
- 11) Pelayanan USG dan EKG

b. UGD 24 Jam

c. Rawat Inap

- 1) Pasien Umum
- 2) Kebidanan (Bersalin)
- 3) Pelayanan Masyarakat

4.2. Karakteristik Subjek Penelitian

4.2.1. Karakteristik berdasarkan pendidikan

Tabel 4.1

Karakteristik pendidikan Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali

No	Pendidikan	F	Prosentase (%)
1	S1	1	33
2	S2	2	67
	Total	3	100

Sumber data primer 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk pendidikan informan sebagian besar dalam kategori S2 yaitu sebanyak 2 orang (67%) dan sebagian kecil dalam kategori S1 yaitu sebanyak 1 orang (33%).

4.2.2. Karakteristik berdasarkan umur

Tabel 4.2
Karakteristik usia Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali

No	Usia	F	Prosentase (%)
1	30-40	1	33
2	>40	2	67
	Total	3	100

Sumber data primer 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk pendidikan informan sebagian besar dalam kategori >40 tahun yaitu sebanyak 2 orang (67%) dan sebagian kecil dalam kategori 30-40 tahun yaitu sebanyak 1 orang (33%).

4.2.3. Karakteristik berdasarkan jabatan

Tabel 4.3
Karakteristik Jabatan Informan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali

No	Usia	F	Prosentase (%)
1	Kepala bagian pengelolaan BLUD	1	33
2	Bagian pengelola teknis	1	33

3	Bagian keuangan dan akuntansi	1	33
	Total	3	100

Sumber data primer 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk jabatan yaitu informan 1 sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD, infroman 2 sebagai Bagian pengelola teknis, informan 3 sebagai Bagian keuangan dan akuntansi.

4.3. Hasil Wawancara

4.3.1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD

Hasil wawancara mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Dulu didampingi BPKP syarat dokumennya ngak tau ada dimana, belum pernah membaca, dulu cuman dibuatin yang penting jadi BLUD”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau untuk syarat secara rinci kita tidak tahu, karena kita hanya di menjalankan, awalnya dulu ada pendampingan, dan penjelasan tentang syarat-syaratnya tetapi sekaran sepertinya hilang atau dimana saya tidak mengetahuinya”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“ kalau ditanya tentang syarat-syaratnya sudah lupa, dulu awal ada pendampingan dari BPKP, dan kita juga dikasih tahu akan syaratnya, tetapi setelah itu lupa, tapi masih ada dan disimpan seperti untuk syarat-syaratnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD semua informan lupa, karena banyaknya persyaratan dan pembentukan BLUD terdapat pendampingan dari BPKP.

Tabel 4.4
Uji kredibilitas sumber
Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Puskesmas Untuk Dapat Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD	<i>Tidak mengetahui persyaratan</i>	<i>Tidak mengetahui</i>	<i>Tidak mengetahui</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD.

Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.5
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Puskesmas Untuk Dapat
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai informan tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD.

4.3.2. Rencana bisnis dan anggaran (RBA) disusun

Hasil wawancara mengenai rencana bisnis dan anggaran (RBA) disusun, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Kita membuat RBA nya membuat RKA seperti biasa, pakai software SIMDA untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran secara rinci tapi yang di cetak memang hanya gelondongan belanja pegawai, belanja barjas, dan belanja modal yang disahkan di PPKD, bentuknya masih mengikuti kode rekening belanja yang ada di SIMDA. Cara menyusunnya masih berbasis belanja, dan hasilnya hanya berupa rincian belanja saja. yaitu RKA 2.2.1 seperti di Keuangan daerah. Kita masih bingung cara buat RBA yang kemudian menjadi RKA dinas kesehatan, jadi karena membuat RBAnyanya masih rinci pakai RKA, pada saat penggunaan anggaran tidak bisa fleksibel, tiap ada perubahan harus lapor ke PPKD, jadi bingung”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Untuk penysunan rencana bisnis dan anggara (RBA) diawali dengan membuat RKA, yang digunakan untuk menyusun kegiatan dan anggaran secara rinci kemudian baru membuat RBA”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Penyusunan RBA biasanya kita membuat rencana kegiatan dan anggaran, setelah itu langkah selanjutnya kita buat RBA, tapi secara rinci kita masih bingung pak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) dimulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Tabel 4.6
Uji kredibilitas sumber
Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA)	<i>Berawal dari membuat RKA</i>	<i>Pembuatan rencana kegiatan</i>	<i>Dimulai dari RKA</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa penyusunan rencana RBA dimulai dari pembuatan RKA. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.7
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) dimulai dari pembuatan RKA	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penyusunan RBA dimulai dari pembuatan rencana kegiatan dan anggaran RKA.

4.3.3. Pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan

Hasil wawancara mengenai pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Yang kita laporkan ke DPKAD adalah buku penerimaan dan pengeluaran secara kas basis, sesuai dengan uang masuk yang diterima dan uang keluar yang di belanjakan, kalau yang dilaporkan pendapatan tidak diterima sama DPKAD soalnya ngak sesuai dengan uang yang ada? Padahal katanya akrual basis? Kayaknya belum paham BLUD DPKADnya”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“biasanya kita melaporkan penggunaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan uang masuk untuk belanja dan uang yang keluar untuk dibelanjakan”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“pelaporan biasanya di ke DPKAD bagian penerimaan dan pengeluaran, di situ kita melaporkan uang yang kita terima dan uang yang sudah dibelanjakan untuk keperluan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan dengan melaporkan uang yang diterima dan uang yang sudah digunakan.

Tabel 4.8
Uji kredibilitas sumber
Pelaporan Pengesahan Penggunaan Anggaran Triwulanan

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan	<i>Pelaporan penerimaan dan pengeluaran uang secara kas basis</i>	<i>Pelaporan uang yang masuk dan yang keluar</i>	<i>Pelaporan penerimaan dan pengeluaran</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.9
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Kemampuan Setiap AR Dalam Berkomunikasi Dengan Wajib Pajak Sudah Baik

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar

4.3.4. Pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi Keuangan (SAK)

Hasil wawancara mengenai pelaporan keuangan berbasis SAK, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Kita belum membuat laporan Keuangan , yang kita buat cuman realisasi anggaran saja. Kita kan banyak background dari perawat, mana bisa kita membuat laporan Keuangan yang harusnya orang akuntansi, padahal kita ngak ada orang akuntansi, ya bingung”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“selama ini kita masih belum membuat laporan keuangan, karena kita masih bingung, cara pembuatan lapora keuangan berbasis SAK bagaimana, kita hanya membuat realisasi anggaran saja”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“sepertinya kita belum membuat pelaporan keuangan, selama yang saya tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan pelaporan keuangan berbasis SAK masih belum berjalan dengan baik.

Tabel 4.10
Uji kredibilitas sumber
Pelaporan Keuangan Berbasis SAK

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	pelaporan keuangan berbasis SAK	<i>Pelaporan masih belum dibuat</i>	<i>Masih belum buat pelaporan hanya realisasi anggaran</i>	<i>Masih belum adanya pelaporan</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa pelaporan keuangan berbasis SAK masih belum berjalan. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.11
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Pelaporan Keuangan Berbasis SAK

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Pelaporan keuangan berbasis SAK	√		√		√	

	masih belum berjalan						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pelaporan keuangan berbasis SAK masih belum berjalan

4.3.5. Laporan keuangan SAK telah diaudit oleh auditor eksternal

Hasil wawancara mengenai laporan keuangan SAK telah diaudit oleh auditor eksternal, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Belum pernah diaudit, laporan aja ngak punya”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“bagaimana bisa mengaudit, kalau tidak adanya laporan”.

Ungkapan informan III sebagai *Bagian keuangan dan akuntansi* yang mengungkapkan sebagai berikut:

“selama ini belum pernah adanya audit karena tidak adanya laporan keuangan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK.

Tabel 4.12
Uji kredibilitas sumber
Laporan Keuangan SAK Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	laporan keuangan (standar akuntansi Keuangan) SAK telah diaudit oleh auditor eksternal	<i>Belum</i>	<i>Belum</i>	<i>belum</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.13
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Laporan Keuangan SAK Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK.

4.3.6. Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK

Hasil wawancara mengenai Kabupaten Boyolali telah memiliki / menyelenggarakan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK, dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“Kayaknya ada perbup nya, tapi kita belum pernah baca, ngak tau sesuai sak atau tidak, SAK aja apa kita masih bingung”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“untuk sistem akuntansi kita sudah, tapi kesesuaian akan SAK kita tidak mengetahui, karena banyak yang harus dipelajari”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“kita ada sistem akuntansinya tetapi tidak mengetahui sesuai atau tidak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK.

Tabel 4.14
Uji kredibilitas sumber
Kabupaten Boyolali Telah Memiliki / Menyelenggarakan Sistem Akuntansi Yang Sesuai Dengan SAK

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Kabupaten Boyolali telah memiliki / menyelenggarakan sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK	<i>Memiliki, tapi tidak mengetahui sesuai SAK atau tidak</i>	<i>Memiliki, tapi tidak mengetahui sesuai SAK atau tidak</i>	<i>Ada tetapi sesuai tau tidak</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi

yang belum sesuai dengan SAK Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.15
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Penguasaan Dan Implementasi Atas Peraturan- Peraturan
Perpajakan

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Kabupaten Boyolali telah memiliki / menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK.

4.3.7. Puskesmas memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD

Hasil wawancara mengenai Puskesmas memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penatausahaan Keuangan

BLUD dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“belum punya”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“selama ini tidak ada”.

Ungkapan informan III sebagai Bagian keuangan dan akuntansi yang mengungkapkan sebagai berikut:

“kita tidak memiliki SOP penetalaksanaan BLUD”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan Puskesmas tidak SOP pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD.

Tabel 4.16
Uji kredibilitas sumber
Puskesmas Memiliki SOP Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan
BLUD

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Puskesmas memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD	<i>Belum ada</i>	<i>Belum</i>	<i>Belum</i>

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa Puskesmas belum memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.17
Uji kredibilitas triangulasi teknik
Puskesmas Memiliki SOP Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan
BLUD

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Puskesmas belum memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Puskesmas belum memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD.

4.3.8. Puskesmas BLUD telah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada standar akuntansi Keuangan (SAK).

Hasil wawancara mengenai Puskesmas BLUD telah menyusun/ memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada standar

akuntansi Keuangan (SAK) dapat dilihat dari hasil seperti yang diungkapkan oleh informan I sebagai Kepala bagian pengelolaan BLUD sebagai berikut:

“belum pernah menyusun”.

Ungkapan ini senada dengan informan II sebagai Bagian pengelola teknis yang mengungkapkan sebagai berikut:

“belum pernah kita menyusun kebijakan akuntansi”.

Ungkapan informan III sebagai *Bagian keuangan dan akuntansi* yang mengungkapkan sebagai berikut:

“belum pernah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap ke tiga informan mengatakan Puskesmas BLUD belum pernah menyusun / memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK.

Tabel 4.18
Uji kredibilitas sumber
Puskesmas BLUD Telah Menyusun / Memiliki Kebijakan Akuntansi
Yang Berpedoman Kepada SAK

No	Pertanyaan	Pernyataan		
		Informan 1	Informan 2	Informan 3

1	Puskesmas BLUD telah menyusun / memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK	<i>Belum pernah</i>	<i>Belum</i>	<i>Belum pernah</i>
---	---	---------------------	--------------	---------------------

Sumber : Data Primer

Dari tabel uji kredibilitas sumber diatas menunjukkan bahwa Puskesmas BLUD belum pernah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK. Selanjutnya peneliti melakukan uji kredibilitas triangulasi teknik berikut hasil uji kredibilitas teknik:

Tabel 4.19

Uji kredibilitas triangulasi teknik
Puskesmas BLUD Telah Menyusun/Memiliki Kebijakan Akuntansi
Yang Berpedoman Kepada SAK

No	Pernyataan	Wawancara		Observasi		Dokumentasi	
		S	TS	S	TS	S	TS
1	Puskesmas BLUD belum pernah menyusun / memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK	√		√		√	

Sumber : data primer

S : sesuai TS : Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil tabel uji kredibilitas teknik diatas didapatkan hasil kesesuaian antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

mengenai Puskesmas BLUD belum pernah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Puskesmas di Kabupaten Boyolali dan setelah dilakukan pengolahan data maka dihasilkan pembahasan data sebagai berikut :

1. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, penyusunan RBA dimulai dari pembuatan RKA, pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar, pelaporan keuangan berbasis SAK masih belum berjalan, belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK, Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK, Puskesmas belum memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD, puskesmas BLUD belum pernah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada SAK. Berdasarkan ringkasan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Ketidaksesuaian implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali di sebabkan karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan pegawai atau SDM yang dimiliki oleh Puskesmas tentang pengelolaan keuangan BLUD disebabkan oleh latar belakang pendidikan pegawai di Puskesmas seluruhnya dari lulusan kesehatan, selain itu juga belum pernah ada software BLUD yang dimiliki oleh pegawai sehingga menjadikan kesulitan dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dinyatakan bahwa PPK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tiga pilar utama dalam pelaksanaan PPK-BLU adalah mempromosikan (1) peningkatan kinerja pelayanan publik; (2) fleksibilitas pengelolaan keuangan; dan (3) tata kelola yang baik (*good governance*). BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: struktur organisasi; prosedur

kerja; pengelompokan fungsi yang logis; pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola pengelolaan keuangan harus memperhatikan prinsip, antara lain: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi

Dalam Permendagri no 61 tahun 2007 disebutkan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, teori Edwards III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan dari suatu penerapan kebijakan publik tidak akan terwujud dengan baik. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan tersebut, kalau kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, apa yang menjadi tujuan juga tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari kebijakan, implementasi kebijakan tersebut harus dipersiapkan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2015) tentang implementasi badan layanan umum daerah, hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara umum RSUD Rokan Hulu belum dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara baik, khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sikap integritas, kuantitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan serta sistem dan prosedur (SOP) untuk bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa BLUD.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspadewi (2014) yang meneliti tentang analisis implementasi pengelolaan keuangan BLUD dan dampaknya terhadap kinerja pada rumah sakit umum daerah Nganjuk, dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dengan berstatus BLUD, Rumah Sakit diberikan wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan Rumah Sakit. Pengelolaan ini dimulai dari perencanaan dan penganggaran BLUD RSUD yang bertujuan agar Rumah Sakit dapat berkembang menjadi organisasi yang *compatible* dengan kebutuhan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Perencanaan dilakukan menggunakan pendekatan *bottom up planning* dan menyusun dokumen anggaran tahunan yaitu RKA SKPD dan RBA BLUD. RSUD Nganjuk telah menyusun dan mengimplementasikan semua persyaratan administratif PK-BLUD yang meliputi Pola Tata

Kelola, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal, dan Laporan Keuangan. Implementasi pola tata kelola diwujudkan dalam bentuk organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta transparansi dan pola tata kelola ini terus dikembangkan dan diperbaiki, Kinerja dari RSUD Nganjuk setiap tahunnya menunjukkan peningkatan bila dilihat dari keuangan (laporan anggaran) dan Indikator Penilaian Efisiensi Pelayanan. Dari hasil-hasil tersebut RSUD Nganjuk telah mampu menjadi BLUD dan menunjukkan tren yang positif, akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam hal perencanaan yang komprehensif untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam implementasi pengelolaan keuangan BLU RSUD Nganjuk adalah kualitas sumber daya yang mengerti dan paham tentang PK-BLUD masih minim, waktu dan anggaran, sistem perencanaan dan evaluasi berkala, kebijakan dalam menyusun RBA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reni (2013) yang meneliti tentang analisis implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di rumah sakit Panembahan Senopati Bantul, hasil penelitian ini didapatkan bahwa Awal proses implementasi banyak dijumpai hambatan yang bersumber dari ketidakfahaman SDM baik dari manajemen maupun keuangan. Tidak adanya piranti pendukung berupa SK Bupati atau Peraturan Bupati serta kurangnya kompetensi SDM keuangan. Tahun 2011-2012 disusun 15 petunjuk pelaksana berbentuk SK dan Peraturan

Bupati, tahun 2012 SDM keuangan diganti dengan personil berbasis akuntansi. Dengan BLUD SDM didorong untuk bekerja dengan efektif dan efisien, karena BLUD merupakan badan nirlaba yang tidak mencari keuntungan. RSUD dapat berkembang bila pendapatan dikelola secara efisien dengan penganggaran yang berorientasi pada standar mutu SPM.

Berdasarkan permasalahan tersebut adapun solusi dalam penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengadaan pelatihan pelatihan tentang BLUD dengan durasi minimal tiga kali pertemuan dan adanya pemantuan terhadap kemajuan kemampuan pegawai dalam pengelolaan keuangan, selain itu juga adanya kepemilikan software BLUD yang bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta laporan keuangan.

STIE Widya Wivana
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk dapat menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD.
2. Penyusunan RBA dimulai dari pembuatan RKA.
3. Pelaporan pengesahan penggunaan anggaran triwulanan yaitu pelaporan uang masuk dan keluar.
4. Pelaporan keuangan berbasis SAK masih belum berjalan.
5. Belum pernah adanya audit pada laporan keuangan SAK.
6. Kabupaten Boyolali telah memiliki/menyelenggarakan sistem akuntansi yang belum sesuai dengan SAK.
7. Puskesmas belum memiliki SOP pelaksanaan penatausahaan Keuangan BLUD.
8. Puskesmas BLUD belum pernah menyusun/memiliki kebijakan akuntansi yang berpedoman kepada standar akuntansi Keuangan (SAK).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kabupaten Boyolali masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

5.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi atau bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan BLUD.
2. Perlu adanya bagian khusus yang bertanggung jawab akan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Puskesmas.
3. Perlu adanya aplikasi pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Dapat dilakukan penelitian mengenai Puskesmas untuk kabupaten lainnya.

STIE Widya Wiyaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J.Moleong, Steven. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amin, Indah M., Hussein, Surya S., Isa, Wan Abdul Rahim Wan Mohd. 2011. *Assessing User Satisfaction of using Hospital Information System (HIS) in Malaysia*. 2011 International Conference on Social Science and Humanity. Link:<http://connection.ebscohost.com/c/articles/74744658/assessing-user-satisfaction-using-hospital-information-system-his-malaysia>
- Budiyanto. (2009). *Tesis: Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Dengan Pendekatan Model Delone Dan Mclean (Studi Kasus Implementasi Billing System Di RSUD Kabupaten Sragen)*. Surakarta: Magister Akutansi FE Universitas Sebelas Maret.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Manual Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Kesehatan. *Jakarta 2013*
- Farida (2015) implementasi badan layanan umum daerah. *Jurnal Universitas Riau*
- Ghozali (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Hari Setiaji, Fathul Wahid (2015). Masalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit: Pelajaran dari Beberapa Proyek. *Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed) VI, p. 1, 2015*
- I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2014). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 9 No 1, Januari 2014*.
- Jogiyanto. (2007a). Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. *Yogyakarta: Andi*.
- Littlejohns P., Wyatt J. and Garvican L. (2003) Evaluating computerised health information systems: hard lessons still to be learnt. *British Medical Journal*, 326: 860–63.
- Menteri Dalam Negeri (2007). Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015*.
- Notoatmodjo, 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta: Yogyakarta.

- Presiden Republik Indonesia (2003). Keuangan Negara. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013*.
- Presiden Republik Indonesia (2005). Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005*.
- Puspadewi (2014) analisis implementasi pengelolaan keuangan BLUD dan dampaknya terhadap kinerja pada rumah sakit umum daerah Nganjuk. *Jurnal Universitas Brawijaya*
- Reni Riawati, Firman Pribadi. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta
- Urquhart, C., Lehmann, H., & Myers, M. D. (2009). Putting the “theory” back into grounded theory: guidelines for grounded theory studies in information systems. *Information Systems Journal*, 20(4), 357–381.
- Wahid, F. (2004). Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Perguruan Tinggi. *Media Informatika*, 2, 11-22.
- Wahid, F. (2012, September 21). *Menganalisis Data*. Dipetik Maret 12, 2014, dari Publikasi Internasional: <http://www.publikasiinternasional.wordpress.com>
- Wahid, F. (2013, Maret 13). *Kontribusi Teoritis*. Dipetik Maret 21, 2014, dari publikasi Internasional: <http://www.publikasiinternasional.wordpress.com>